

Diaspora Politik Mantan Kombatan GAM

Fajar Kuala Nugraha*

Abstrak

Lebih dari 20 tahun Aceh bergolak, pergolakan yang terjadi antara GAM yang berasal kubu pemberontak yang ingin memerdekakan diri, dengan kubu TNI yang mewakili pemerintah. Konflik yang telah membawa kesengsaraan, dimana dampak terbesar dirasakan oleh masyarakat. Kini setelah konflik itu mereda GAM sebagai kelompok pemberontak mulai mentransformasikan dirinya kedalam partai politik untuk merebut jabatan di daerah. Namun upaya merebut kekuasaan ini membawa dampak perpecahan dalam tubuh GAM itu sendiri. Akhirnya perpecahan ini menjadi penyebab para anggota GAM melakukan diaspora politik dan menyebar pada beberapa partai politik, mulai dari partai lokal di Aceh hingga partai nasional.

Kata Kunci: *GAM, partai politik, dan diaspora*

Abstract

More than 20 years of violent conflict between GAM (Aceh freedom movement) and the government of Indonesia has caused misery and suffering on both parties but particularly to the people living in Aceh. After the conflict finally resolved, GAM has transformed itself into political parties to gain power and authority in the local offices. However, these political efforts has caused dissension among ex-member of GAM. Hence, those who have disagreement choose to join other political parties spread from the local political parties in Aceh to to the national polical parties making a vast political diaspora.

Kata Kunci: *GAM, political parties, and political diaspora*

***Korespondensi:**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas
Brawijaya Jalan Veteran, Malang 65145
Email:

Pengantar

Daerah Istimewa, merupakan sebutan yang layak dialamatkan kepada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Mengapa tidak lebih dari, lebih dari 20 tahun Aceh bergolak dengan permasalahan konflik, konflik yang menyebabkan ratusan nyawa melayang. Konflik yang berfokus pada dua pihak bersenjata, yakni TNI di kubu pemerintah dan pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di kubu pasukan pembebasan Aceh. Konflik berkepanjangan ini akhirnya menyebabkan Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Secercah harapan muncul, dibarengi bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004, menghancurkan sebagian besar wilayah Aceh. Sebanyak 173.981 jiwa meninggal dalam bencana ini, dan korban terbesar adalah perempuan dan anak-anak (Nilasari, 2011). Bencana ini membuka mata banyak kalangan yang berkonflik dan dari sinilah berbagai perundingan dilakukan oleh pemerintah dan GAM untuk mengakhiri konflik yang terjadi selama ini. Akhirnya muncullah kesepakatan damai antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia. Bentuk dari kesepakatan damai tersebut adalah dikenal dengan sebutan MoU Helsinki dan diikuti dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2002 tentang Otonomi Daerah Khusus Aceh.

Dengan berakhirnya konflik ini menyebabkan para mantan anggota GAM mulai menyusun kehidupannya kembali. Sebagian anggota GAM membaaur dengan masyarakat sekitar dengan pekerjaan yang beragam. Namun sebagian mantan anggota GAM lainnya mulai merambah dunia politik. Partisipasi mereka dalam dunia politik ini tercermin dari munculnya beberapa partai politik lokal Aceh yang dibentuk oleh mantan petinggi kombatan GAM. Sebagian lagi mulai menduduki jabatan-jabatan publik di dalam pemerintahan.

Partai politik lokal yang dibentuk oleh mantan petinggi kombatan GAM ini tidak serta merta menjadi partai politik utama pilihan mantan anggota kombatan GAM lainnya. Hal ini menyebabkan para mantan anggota kombatan GAM ini melakukan Diaspora Politik, dengan menyebar pada beberapa partai politik baik itu partai politik skala lokal maupun partai politik skala nasional. Penyebaran mereka ini menyebabkan peta politik di daerah Aceh semakin berwarna, karena tidak ada satu partai politikpun yang merupakan representasi utama basis mantan kombatan GAM ini.

Berdasarkan gagasan tersebut, makalah ini berusaha untuk memetakan peta penyebaran diaspora mantan kombatan GAM dalam partai politik dalam ranah Aceh. Dengan kata lain partai politik mana saja yang menjadi pilihan mantan kombatan GAM. Selain itu, makalah ini juga akan memotret intrik yang terjadi antara sesama mantan kombatan GAM dalam perebutan kedudukan di partai politik.

Diaspora Sebagai Kerangka Teoritik

Diaspora politik merupakan suatu istilah politik yang masih terdengar asing pada telinga sebagian kalangan di Indonesia. Diaspora merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti penyebaran atau penaburan benih. Studi tentang diaspora ini mulai muncul sekitar akhir abad ke 20, dengan tokoh centralnya seperti Jacob Riis dan Stuart Hall. Istilah diaspora ini lebih banyak diadopsi untuk menjelaskan penyebaran penduduk bangsa suatu negara, seperti misalnya bangsa Yahudi yang tersebar ke penjuru dunia sebelum negara Israel berdiri pada tahun 1948. Selain itu penggunaan istilah diaspora ini lebih banyak digunakan untuk menjelaskan persebaran kebudayaan.

Untuk dalam konteks politik tersendiri khususnya partai politik, diaspora dapat diartikan sebagai menyebarnya atau berpindahnya orang-orang ke dalam partai-partai politik dengan berbagai motif dan latar belakang tertentu. Motif dan latar belakang inilah yang berpotensi untuk mengancam atau merusak keharmonisan pranata dan eksistensi politik suatu partai. Diaspora ini dilihat sebagai suatu gejala sosial, yang terjadi secara fisik, material, maupun kebudayaan. Dalam perspektif diaspora terdapat tiga aspek yang dapat dilihat dalam melakukan arus pertukaran politik. Pertama, pelaku diaspora itu sendiri. Kedua, partai politik baru yang dituju. Ketiga, generasi penerus di dalam partai politik tersebut.

Diaspora yang kemudian terjadi pada mantan kombatant GAM yang ada di Aceh. Para mantan kombatant GAM berdiaspora masuk ke dalam partai-partai politik. Diaspora ini terlihat dari munculnya partai-partai politik lokal yang didirikan oleh mantan petinggi GAM, seperti misalnya Partai Aceh (PA) yang merupakan perwujudan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selain PA ada lagi beberapa partai lain yang dibentuk oleh mantan kombatant GAM seperti Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh. Bukan hanya mendirikan partai para kombatant GAM ini juga menyebar ke partai-partai skala nasional seperti Partai Golkar.

Perpecahan Politik Mantan Kombatant GAM

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pernah menjadi sorotan utama dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Gerakan ini muncul sebagai bentuk perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintahan Orde Baru yang terlalu sentralistik dan sepenuhnya dikuasai oleh militer. Munculnya musuh bersama ini menyebabkan GAM menjadi sangat solid dan susah untuk ditundukkan oleh pemerintah. Berbagai cara dilakukan

oleh pemerintah mulai dari jalan damai dalam bentuk perundingan-perundingan, hingga jalan kekerasan dengan menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Solidnya GAM dalam menjalankan organisasinya memang terbukti ketika berhadapan dengan musuh bersama. Tetapi sebagai sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat individu, GAM juga mengalami suatu degradasi maupun konflik. Konflik ini terjadi di internal GAM itu sendiri sehingga timbul suatu perpecahan atau keretakan. Untuk melihat perpecahan dan keretakan di dalam internal GAM ini, setidaknya ada tiga fase yang dapat menjadi perhatian.

Pertama, fase ketika berkuasanya Gubernur Abdullah Puteh. Fase ini merupakan fase awal munculnya perpecahan di dalam internal GAM. Perpecahan ini diakibatkan karena GAM lebih memilih menjadi oposisi dari pemerintah daerah yang berkuasa saat itu. GAM tetap menganggap paket otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk tipuan untuk mengbag daerah diluar Jawa menjadi koloni Indonesia. GAM juga tidak tertarik untuk menjadi gubernur berikutnya, dan para komandannya cukup puas dengan memungut pajak-pajak evolusioner (hak sabil dan pajak nangroe) khususnya dari kantor-kantor pemerintah, kontraktor, dan politikus, untuk membiayai perjuangan mereka (Sulaiman dan Klinken, 2007)

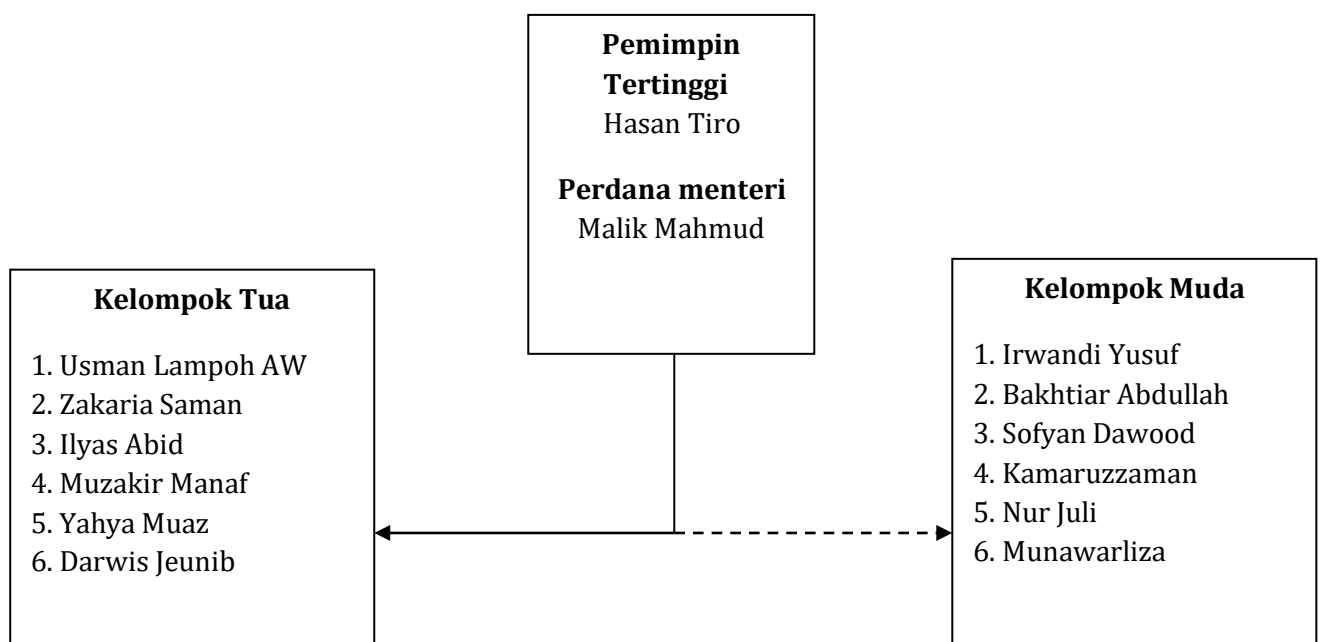
Kedua, fase ketika akan dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung pasca perundingan damai di Hensinki. Solidnya pergerakan GAM ini akhirnya mulai terkikis menjelang diadakannya Pilkada langsung pada tahun 2006. Pilkada ini memunculkan konflik internal dan lebih condong menimbulkan faksionalisasi ditubuh mantan kombatan GAM dalam menentukan calon kandidat gubernur yang akan diusung oleh GAM. Mantan kombatan GAM terpecah menjadi dua kelompok yaitu kelompok tua dan kelompok muda.

Kelompok tua berusaha memasang Hasbi Abdullah dan Human Hamid. Sedangkan kelompok muda berusaha mengusung Nashiruddin sebagai bakal calon gubernur Aceh. Jalan voting menjadi pilihan terakhir untuk menentukan kandidat calon gubernur Aceh, dan terpilihlah Nashiruddin. Nashiruddin menolak penunjukannya sebagai bakal calon gubernur Aceh dan lebih memilih hidup di desa dengan para janda-janda dan keluarga korban konflik Aceh lainnya. Sehingga akhirnya konflik di internal GAM ini semakin meruncing. Perpecahan kedua kelompok ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan 1

Akhirnya Pilkada langsung yang dilakukan untuk pertama kalinya semenjak MoU Helsinki dimenangkan oleh pasangan Irwandi-Nazar yang merupakan mantan kombatan GAM. Pasangan ini mampu unggul di Aceh Tenggara yang selama ini dikenal sebagai basis perolehan suara utama Partai Golkar. Di sana, Irwandi mengumpulkan 37.217 suara mengalahkan pasangan Malik A Raden-Sayed Zakaria yang merupakan Ketua Partai Golkar di Aceh yang hanya memperoleh 22.291 suara (Kaliwarang, 2010). Pasangan ini juga mampu menang di daerah Sabang yang merupakan daerah putih.

Bagan 1

Pengelompokkan ditubuh GAM



Sumber: Djafar, 2009

Ketiga, fase dimana suara mantan kombatan GAM pecah menjelang Pilkada Gubernur 2011. Perpecahan diantara sesama mantan kombatan GAM kemudian berlanjut pada saat Pilkada Gubernur Aceh pada tahun 2012. Partai Aceh mengukung pasangan Zaini Abdullah yang merupakan mantan menteri luar negeri GAM, sementara wakilnya, Muzakir Manaf adalah ketua Partai Aceh (PA). Selain Zaini-Muzakki sebenarnya ada satu kandidat gubernur mantan anggota GAM yang mencalonkan diri, yaitu Irwandi Yusuf. Irwandi Yusuf juga sebelumnya duduk sebagai Gubernur Aceh, kini tak didukung oleh partai dan maju lewat jalur independen. Suara mantan kombatan

ini pecah. Mereka terbagi kedalam dua kubu, yakni kubu pendukung Partai Aceh (PA) dan kubu pendukung Irwandi.

Menurut perhitungan beberapa lembaga survei pasangan Zaini-Muzakki unggul jauh dari para pesaingnya termasuk pasangan Irwandi-Yunan yang juga merupakan mantan kombatan GAM. Kemenangan Zaini-Muzakki ini merupakan bentuk dari keunggulan mereka dalam memanfaatkan keberadaan mantan kombatan GAM lainnya. Selain itu pasangan ini juga mendapat dukungan dari Partai Aceh yang merupakan partai lokal terbesar di Aceh saat ini dengan basis masa mantan kombatan GAM yang berpengaruh di masyarakat.

Perpecahan Pendorong Diaspora Politik

Perpecahan yang terjadi di dalam tubuh anggota GAM memunculkan proses diaspora politik. Kombatan GAM yang awalnya memiliki tingkat solidaritas yang tinggi akhirnya pecah juga. Perpecahan ini terjadi ketika kepentingan individu antara setiap mantan kombatan tidak dapat diakomodasi oleh partai politik tempat mereka bernaung. Pecahnya suara GAM dalam ranah politik di Aceh juga disebabkan karena adanya konflik kepentingan yang didasari atas keinginan untuk menguasai Aceh.

Cerminan diaspora politik mantan kombatan GAM di Aceh dapat dilihat pada Partai Aceh (PA). Partai lokal terbesar yang saat ini terdapat di bumi Serambi Mekah. Partai Aceh dapat dikatakan sebagai partai tempat berkumpulnya mantan kombatan GAM. Partai ini merupakan mutasi langsung yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi sebuah partai politik. Partai Aceh ini didirikan oleh Muzakki Manaf salah satu mantan panglima GAM.

Tabel 1: Diaspora Kombatan Dalam Partai Politik

No.	Nama	Jabatan di GAM	Partai Politik
1.	Shadia Marhaban	Organisasi mantan perempuan kombatan GAM	Partai Independen Rakyat Aceh (SIRA)
2.	M. Nazar	Anggota GAM	Partai Independen Rakyat Aceh (SIRA)
3.	Irwandi Yusuf	Mantan panglima GAM	Partai Aceh (PA)
4.	Zaini Abdullah	Mantan panglima GAM	Partai Aceh (PA)
5.	Malik Mahmud	Mantan Perdana Menteri GAM	Partai Aceh (PA)
6.	Muzakki Manaf	Mantan panglima GAM	Partai Aceh (PA)
7.	Sarjani	Mantan Panglima GAM wilayah	Partai Aceh (PA)

Pidie			
8.	Tgk Zulkarnaini	Mantan panglima GAM wilayah Pase	Partai Aceh (PA)
9.	Irwansyah alias Teungku Mukhsalmina	Mantan Panglima GAM Aceh Rayeuk	Partai Nasional Aceh (PNA)
10.	Muharram Idris	Mantan Ketua KPA Aceh Rayeuk	Partai Nasional Aceh (PNA)
11.	Ligadinsyah	Mantan Panglima GAM Linge	Partai Nasional Aceh (PNA)
12.	Amni bin Ahmad Marzuki	Mantan Juru Runding GAM	Partai Nasional Aceh (PNA)

Sumber: Diolah oleh penulis

Diaspora ini muncul ketika mendekati pilgub 2011, Irwandi Yusuf yang awalnya diusung oleh para mantan kombatan GAM pada pilgub 2006 tidak mendapatkan dukungan kembali, dan lebih memilih bertarung melalui jalur independen. Partai Aceh sebagai perwujudan dari GAM lebih memilih mengusung pasangan Zaini Abdul, mantan anggota GAM yang berbasis di Swedia, dan Muzakkir Manaf mantan panglima sayap gerakan GAM. Selain itu tidak dicalonkannya kembali Irwandi Yusuf berlatar belakang *rivalitas* lama internal GAM antara Irwandi Yusuf dan Malik Mahmud.

Kecewa terhadap keputusan tersebut akhirnya Irwandi Yusuf keluar dari Partai Aceh. Keluarnya Irwandi Yusuf ini diikuti oleh beberapa mantan anggota kombatan GAM yang merupakan pendukung Irwandi Yusuf. Para mantan anggota GAM ini berencana untuk melahirkan partai baru yang dieruntukkan bagi mantan kombatan lainnya yang tidak diterima lagi oleh Partai Aceh. Adapun mantan anggota GAM yang mendukung Irwandi Yusuf tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2: Mantan kombatan GAM pendukung Irwandi Yusuf

No.	Nama	Posisi Di GAM
1.	Muharram Idris	Panglima GAM Wilayah Muda Aceh Rayek
2.	Ramadana	Panglima GAM Wilayah Bener Meriah
3.	Ayah Merin	Panglima GAM Wilayah Sabang
4.	Alex/Baktiar	Panglima GAM Wilayah Mereuhon, Aceh Jaya
5.	Abrar Muda	Panglima GAM Wilayah Lhok, Tapak Tuan
6.	Nurdin	Panglima GAM Wilayah Singkil
7.	Win Kaka	Panglima GAM Wilayah Aceh Tenggara

8.	Panji	Panglima GAM Wilayah Gayo Lues
9.	Aman Begi	Panglima GAM Wilayah Aceh Tengah
10.	Almarhum Saiful Cage	Panglima GAM Wilayah Bireun
11.	Helmi	Panglima GAM Wilayah Tamiang
12.	Abu Sanusi	Panglima GAM Wilayah Pereulak, Aceh Timur
13.	Abu Yus	Panglima GAM Wilayah Meulaboh
14.	Abdul Rahman	Panglima GAM Wilayah Abdya
15.	Nurdin	Panglima GAM Wilayah Simeulu

Sumber: <http://www.acehloensayang.com>

Namun dari kelimabelas mantan kombatan GAM tersebut tiga di antaranya memutuskan untuk kembali ke dalam barisan Partai Aceh. Sedangkan dua panglima mantan kombatan GAM wilayah Pidie dan wilayah Pase memang dari awal tidak pernah mendukung Irwandi Yusuf.

Bagai sebuah perahu yang sudah bocor, walaupun ditambah beribu kalipun pasti akan tetap akan bocor juga. Sehingga perahu tersebut akan sangat mudah untuk ditenggelamkan oleh sapuan ombak ataupun angin. Perumpamaan inilah yang digunakan oleh beberapa tokoh yang telah keluar dari Partai Aceh, sehingga mereka secara bersamaan berusaha menciptakan partai politik lokal baru yang mereka jadikan sebagai kendaraan politik. Para mantan kombatan GAM yang telah keluar dari Partai Aceh berdiaspora dengan menciptakan partai baru yakni Partai Nasional Aceh.

Walaupun sebagian besar orang yang duduk di Partai Nasional Aceh saat ini merupakan mantan kombatan GAM yang berasal dari Partai Aceh, namun ada juga beberapa orang yang saat ini duduk di dalam Partai Nasional Aceh berasal dari partai lain sebelum masuk ke dalam Partai Nasional Aceh. Menurut data yang didapat orang-orang tersebut di antaranya adalah Tarmizi, Lukman Age, dan Thamren Ananda yang ketiganya merupakan eks Sekjen Partai Rakyat Aceh. Struktur kepengurusan hampir menyerupai sistem GAM dan TNA yang terdiri dari 17 wilayah dari jumlah kabupaten/kota. Seperti yang dikutip dari ketua umum PNA kepada *Suara Republik*, beliau menyatakan:

“dari 17 wilayah itu memang, semua dari barisan kita, kita melihat dari sistem musyawarah. Tanpa musyawarah bukan suatu organisasi yang kuat, atas dasar itulah membentuk suatu wadah untuk amanah rakyat.” (Suara Republik, 2012).

Catatan Penutup

Setelah berlutak dalam kelamnya konflik vertikal maupun horizontal, Aceh kini mulai membangun daerahnya dengan semangat baru. Semangat untuk bangkit dari keterpurukan baik itu dalam sektor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Masyarakat kini berusaha mengobati trauma akibat konflik yang berkepanjangan. Saling menghormati dan menghargai merupakan jalan utama yang coba dipertahankan masyarakat Aceh.

Kelompok separatisme GAM yang dahulu berjuang memerdekakan Aceh dengan mengangkat senjata melawan pemerintah, kini berjuang melalui jalan politik untuk memerdekakan masyarakat. Mantan kombatan GAM kini berbondong masuk ke dalam partai politik guna menyalurkan aspirasinya. Selain itu Setiap orang berlomba-lomba membuat partai politik lokal baru di Aceh. Mantan kombatan GAM ini serius mempersiapkan partai politik lokal mereka untuk bertarung dalam kontestasi politik di daerah Aceh. Akhirnya kran demokrasi partai politik lokal Aceh terbuka, dan beredar 20 calon partai politik lokal di Aceh.

Dengan semakin berdiasporanya mantan kombatan GAM ini di ranah politik lokal Aceh menciptakan suatu warna baru dalam peta perpolitikan. Diaspora ini merupakan bentuk bahwa, mantan kombatan GAM juga mampu diterima dan berkontestasi di dalam politik lokal. Mantan kombatan GAM ini diharapkan dapat menciptakan suasana Aceh yang lebih baik lagi. Ini merupakan perwujudan dari dekatnya mantan kombatan GAM ini dengan kebutuhan mendesak apa yang saat ini dibutuhkan di dalam masyarakat Aceh.

Namun di sisi lain konflik internal mantan kombatan GAM ini juga memiliki pengaruh buruk dalam perkembangan politik lokal di Aceh. Keadaan konflik elit lokal ini dapat memicu bara konflik lagi di dalam masyarakat. Apalagi ketika sudah berhadapan dengan masalah kekuasaan. Para elit lokal mantan kombatan GAM ini seharusnya lebih mencerminkan sikap yang dapat dicontoh oleh masyarakat***.

Daftar Pustaka

Buku:

- Kawilarang, Harry. (2010). Aceh dari sultan Iskandar Muda ke Helsinki. Bandar Publishing: Banda Aceh.
- Nilasari, Ivo. (2011). *Perempuan Aceh Dalam Otonomi Daerah Khusus*. Dalam buku Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Sulaiman, M. Isa dan Klinken, Gerry van. (2007). *Naik Daun Dan Kejatuhan Gubernur Puteh*. Dalam buku Politik lokal di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Tornquist, Olle, Stanley Adi Prasetyo, dan Teresa Birks (ed.). (2011). Aceh: Peran Demokrasi Bagi Perdaaian dan Rekonstruksi. PCD Press Indonesia: Yogyakarta.

Skripsi:

- Djafar, Muhammad. (2009). Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Universitas Diponegoro: Semarang. Skripsi Tidak Dipublikasikan.

Website:

- Diakses melalui laman web <http://www.acehloensayang.com> yang berjudul “Daftar Nama Panglima GAM Yang Dipecat Karena Dukong Irwandi” pada hari Rabu, 17 Oktober 2012 pukul 02.30
- Diakses melalui laman web <http://www.tabloidsuarapublik.com> yang berjudul “PNA Lahir, Wujud Demokrasi Kerakyatan” pada hari Rabu 17 Oktober 2012 pukul 5.34
- Diakses melalui laman web <http://partaiindependenaceh.wordpress.com> yang berjudul “Partai Nasional Aceh (PNA) melawan kezaliman Partai Aceh (PA)” pada hari Selasa 20 Nopember 2012 pukul 21.59